

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek/Daerah Penelitian

Penelitian ini mencakup lima jenis dana yang merupakan sumber utama pendanaan bagi pembangunan di Kabupaten Pulau Kalimantan, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah dan dana desa. Masing-masing jenis dana memiliki peran dan tujuan spesifik dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Data tahunan akan dianalisis dalam penelitian ini yang diambil melalui BPS dan direktorat jendral perimbangan periode 2018-2022.

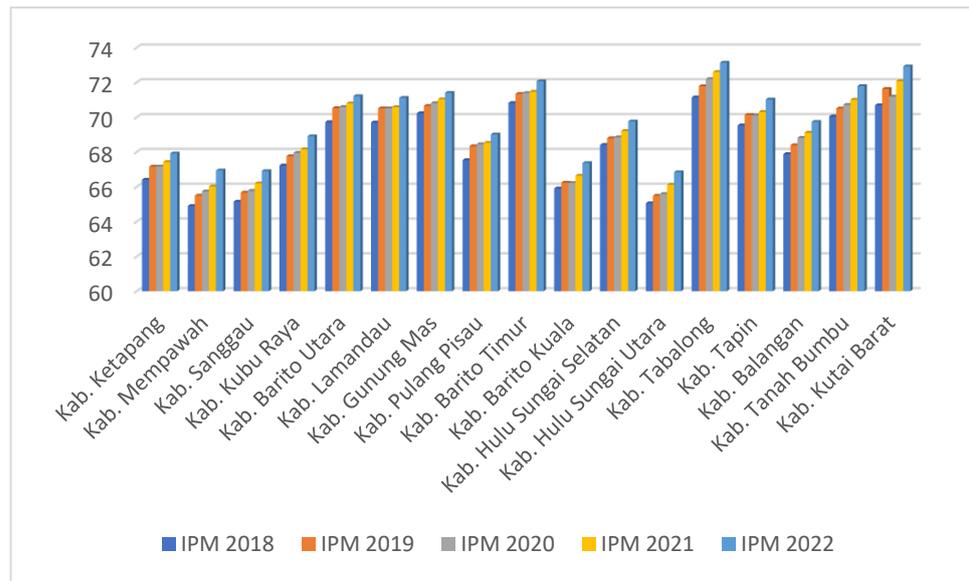
4.1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah atau negara. IPM menggabungkan 3 indikator penting seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang tercermin dalam pendapatan per kapita. IPM menjadi penting karena mencerminkan seberapa baik suatu wilayah atau kota dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Semakin tinggi IPM suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan.

Ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya juga dapat tercermin dalam IPM. Sebuah ibu kota negara yang siap harus mampu menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai bagi penduduknya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kehidupan yang berkualitas.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pulau Kalimantan menunjukkan tren yang positif dari tahun 2018 hingga 2022. Sebagian besar kabupaten di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan IPM selama periode tersebut, mencerminkan upaya pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor.

(Sumber: BPS)



Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten-kabupaten

Pulau

Gambar 4. 1 IPM Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022

Kalimantan menjadi cerminan kesiapan potensial sebagai ibu kota negara baru. Data IPM dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang konsisten di sebagian besar kabupaten, mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal. Kabupaten Tabalong, misalnya, menunjukkan trend positif dengan IPM yang meningkat dari skor 71.14 pada tahun 2018 menjadi skor 73.13 pada tahun 2022, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan indikator-indikator penting seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Selain Tabalong, beberapa kabupaten lain seperti Kutai Barat dan Barito Utara juga mencatat peningkatan signifikan dalam IPM mereka. Kutai Barat, dengan IPM yang naik dari skor 70.69 pada tahun 2018 menjadi skor 72.92 pada tahun 2022, menunjukkan keberhasilan dalam program pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Barito Utara menunjukkan peningkatan dari skor 69.72 menjadi skor 71.21 dalam rentang waktu yang sama, mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur pendukung.

Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus diatasi di beberapa kabupaten. Kabupaten Mempawah dan Sanggau, meskipun mengalami peningkatan IPM, tetap dibawah rata rata ipm nasional.

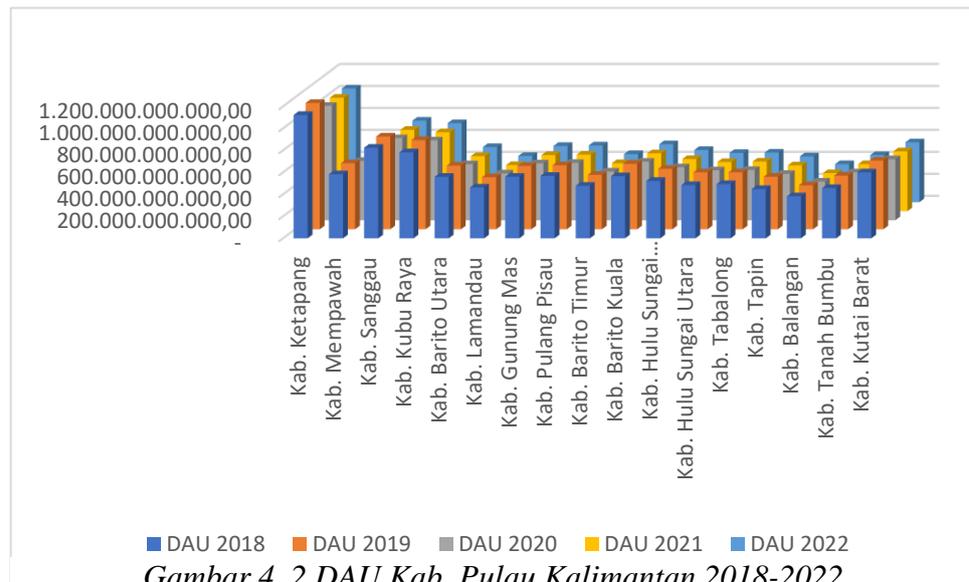
4.1.2 Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara berkala. Tujuan utama dari DAU adalah untuk mendukung pembangunan di tingkat daerah, termasuk dalam hal penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta untuk memperkuat pemerintahan daerah. DAU menjadi penting karena mencerminkan tingkat dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara baru. Jumlah DAU yang besar menandakan komitmen pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dan layanan publik yang memadai di wilayah tersebut.

DAU juga memberikan dasar keuangan yang stabil bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya, termasuk dalam mengatur dan mengelola ibu kota negara. Dengan adanya DAU yang cukup, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor yang mendukung keberhasilan ibu kota negara baru.

Selain itu, DAU juga menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan DAU yang efisien dan tepat sasaran akan memberikan dampak positif bagi kesiapan sebuah wilayah sebagai ibu kota negara, karena memungkinkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

(Sumber:DJPK)



Gambar 4. 2 DAU Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022

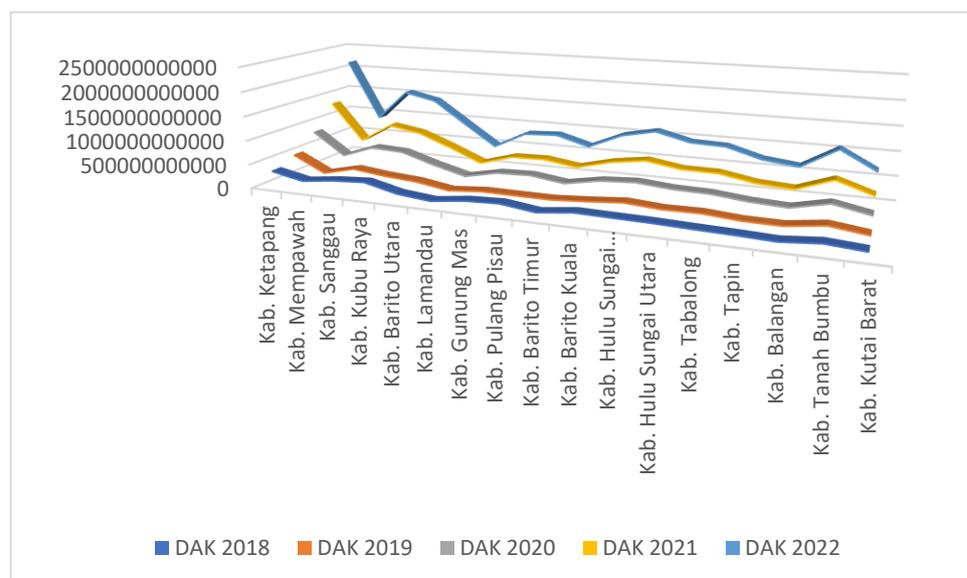
Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) di kabupaten-kabupaten Pulau Kalimantan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesiapan sebagai ibu kota negara baru. Data DAU dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten, mencerminkan perbedaan dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kabupaten seperti Kutai Barat dan Sanggau menunjukkan kestabilan dalam penerimaan DAU mereka selama periode tersebut. Misalnya, Kutai Barat mencatat DAU sekitar 600 miliar pada tahun 2018 dan meningkat secara konsisten menjadi sekitar 544 miliar pada tahun 2022, menandakan pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pembangunan dan kesiapan infrastruktur.

Di sisi lain, ada kabupaten-kabupaten seperti Balangan dan Hulu Sungai Utara yang menghadapi tantangan dalam pertumbuhan DAU mereka. Meskipun mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun, peningkatan ini tidak sebesar kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan perlunya fokus tambahan dalam strategi pengelolaan keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan DAU dan mendukung berbagai program pembangunan yang dibutuhkan untuk menjadi ibu kota negara baru.

4.1.3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah bentuk alokasi anggaran yang disediakan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau instansi tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. DAK umumnya diberikan untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang ingin memastikan adanya



penggunaan dana yang spesifik dalam bidang-bidang prioritas nasional atau daerah yang membutuhkan dorongan tambahan dalam hal pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor-sektor lainnya. Hal ini karena dana ini memungkinkan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan fasilitas utama yang vital, seperti jembatan, jalan raya dan fasilitas transportasi umum, yang semuanya adalah tulang punggung mobilitas dan aktivitas ekonomi di ibu kota.

(Sumber:DJPK)

Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di kabupaten-kabupaten Pulau Kalimantan dari tahun 2018 sampai 2022 mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam alokasi dana ini antar kabupaten, mencerminkan upaya pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta pelayanan publik di masing-masing daerah. Beberapa kabupaten seperti Ketapang dan Sanggau mencatat peningkatan yang signifikan dalam penerimaan DAK mereka selama periode tersebut. Misalnya, Ketapang mengalami lonjakan dari sekitar 335 miliar pada tahun 2018 menjadi lebih dari 2.15 triliun pada tahun 2022, menandakan komitmen kuat dalam mendukung

Gambar 4. 3 DAK Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022

pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, terdapat kabupaten-kabupaten seperti Lamandau dan Barito Timur yang menghadapi tantangan dalam pertumbuhan DAK mereka. Meskipun mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun ke tahun ini tidak sebesar kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam alokasi dan penggunaan dana untuk memaksimalkan dampak pembangunan yang diinginkan dalam waktu yang ditetapkan.

Selain sebagai indikator finansial, data DAK juga mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Kabupaten-kabupaten seperti Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan, meskipun menerima alokasi yang signifikan, terus berupaya meningkatkan infrastruktur dasar dan layanan publik. Peningkatan ini penting untuk memastikan bahwa kualitas hidup penduduk lokal meningkat sejalan dengan persiapan menjadi pusat administrasi baru yang lebih besar dan kompleks.

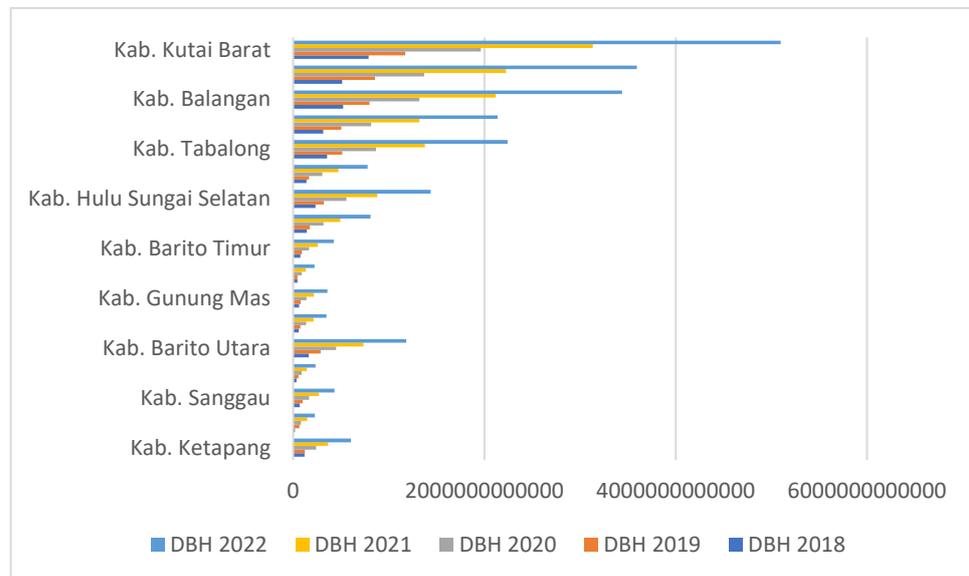
4.1.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam atau sumber pendapatan tertentu lainnya di daerah tersebut. DBH bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dengan cara membagi sebagian pendapatan pusat kepada daerah penghasil.

Dana Bagi Hasil (DBH) memainkan peran penting dalam mendukung kesiapan suatu daerah menjadi ibu kota negara melalui peningkatan kapasitas fiskal. Dengan alokasi DBH yang signifikan, pemerintah daerah memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan daerah tersebut merencanakan dan melaksanakan proyek strategis yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara. DBH juga digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur fisik yang mendukung fungsi pemerintahan pusat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan transportasi, dan fasilitas perkantoran.

Selain itu, DBH mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah calon ibu kota negara. Tambahan pendapatan dari DBH memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, seperti membangun dan memperbaiki sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan. Layanan publik yang berkualitas menarik penduduk dan tenaga kerja yang berkualitas, mendukung keberhasilan daerah tersebut sebagai ibu kota negara. DBH juga memungkinkan daerah mengembangkan potensi ekonomi lokal, memberikan insentif bagi investasi, mengembangkan sektor ekonomi unggulan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan demikian, DBH menjadi instrumen penting untuk menilai dan mendukung kesiapan daerah menjadi ibu kota negara yang modern, efisien, dan berkelanjutan.



(Sumber:DJPK)

Gambar 4. 4 DBH Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022

Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh kabupaten-kabupaten di Pulau Kalimantan menjadi gambaran penting dalam memahami perkembangan ekonomi dan keuangan daerah. Data DBH dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren signifikan peningkatan yang terjadi di berbagai kabupaten. Misalnya, Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan dari sekitar 118 miliar pada tahun 2018 menjadi lebih dari 604 miliar pada tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten di daerah tersebut. Hal ini penting sebagai indikator keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan non-pajak, yang dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan layanan publik di masa mendatang.

Selain Kabupaten Ketapang, kabupaten-kabupaten lainnya seperti Barito Utara dan Kutai Barat juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam penerimaan DBH mereka. Kabupaten Barito Utara, misalnya, meningkat dari sekitar 162 miliar pada tahun 2018 menjadi lebih dari 1.18 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini

menunjukkan efektivitas dalam manajemen sumber daya alam dan pengelolaan keuangan daerah.

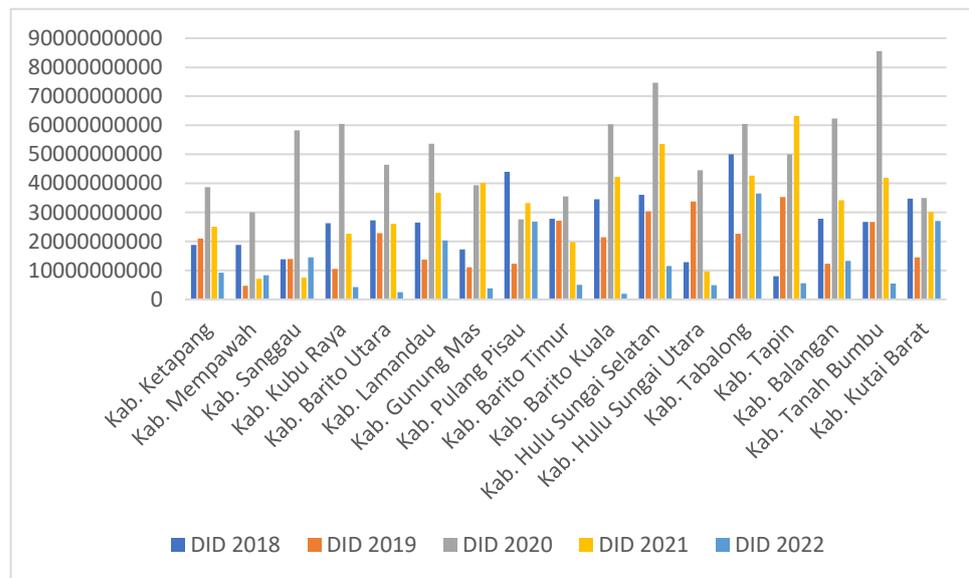
Di sisi lain, terdapat juga kabupaten-kabupaten seperti Mempawah dan Pulang Pisau yang menghadapi tantangan dalam pertumbuhan DBH mereka. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan ini tidak sebesar kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam diversifikasi sumber pendapatan daerah serta optimalisasi penggunaan DBH untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan sebagai persiapan menjadi pusat administrasi negara yang baru.

4.1.5 Perkembangan Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah adalah bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kinerja dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dana ini biasanya diberikan berdasarkan pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan, seperti pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau pencapaian target tertentu dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

Dana ini tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menguatkan kapasitas administrasi dan infrastruktur yang diperlukan bagi sebuah ibu kota negara. Dengan adanya dana insentif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki infrastruktur transportasi dan komunikasi, serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, pemberian dana insentif daerah juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kemampuan suatu daerah untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Hal ini penting karena sebuah ibu kota negara harus mampu menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.



(Sumber: DJPK)

Gambar 4. 5 DID Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022

Dengan menggunakan dana insentif secara bijaksana dan transparan, pemerintah daerah dapat mengukur dan meningkatkan kesiapan mereka dalam mengemban peran sebagai pusat administrasi negara yang baru, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan masyarakat secara luas

Dana Infrastruktur Daerah (DID) merupakan alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan di tingkat lokal. Di Kabupaten Pulau Kalimantan, perkembangan DID dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur dasar. Sejak tahun 2018 hingga 2022,

berbagai kabupaten seperti Ketapang, Mempawah, Sanggau, dan Kubu Raya mengalami peningkatan yang cukup mencolok dalam penyaluran dana ini.

Salah satu contoh signifikan adalah Kabupaten Ketapang, yang mengalami kenaikan penyaluran DID dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Kabupaten Ketapang menerima sekitar 18,75 miliar, yang kemudian meningkat menjadi 38,66 miliar pada tahun 2020, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur dasar yang vital bagi masyarakat setempat. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Mempawah dan Sanggau, yang meskipun mengalami fluktuasi tahunan, tetap menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan DID untuk proyek-proyek infrastruktur yang strategis.

Perkembangan DID juga menjadi cerminan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi tantangan menjadi ibu kota negara baru. Dana ini tidak hanya untuk membangun jalan dan jembatan, tetapi juga untuk meningkatkan konektivitas, akses layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan penggunaan DID yang efektif dan transparan, pemerintah daerah di Kabupaten Pulau Kalimantan dapat memperkuat infrastruktur dasar sebagai fondasi penting dalam mendukung peran sebagai pusat administrasi negara yang baru, yang efisien dan mampu bersaing dalam skala nasional maupun internasional.

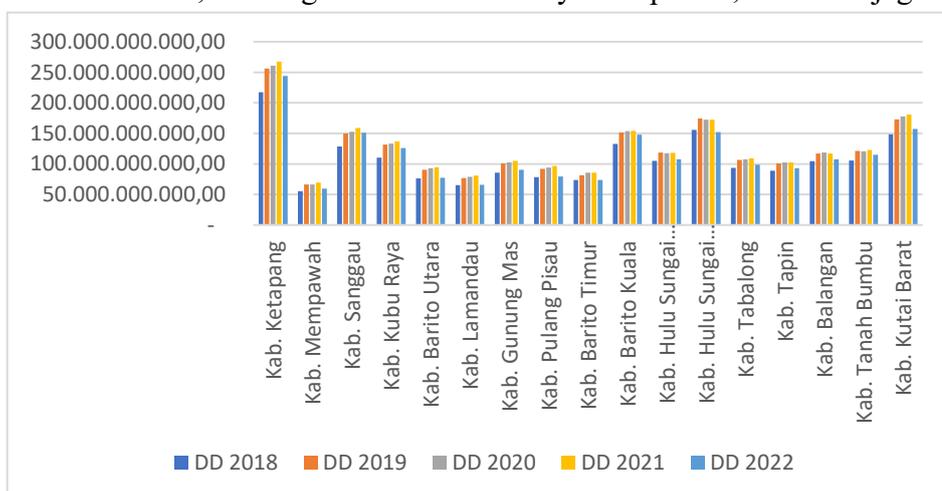
4.1.6 Perkembangan Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat perekonomian desa dan memperbaiki infrastruktur dasar. Dalam konteks kesiapan sebagai ibu kota negara, Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengembangan desa-desa yang menjadi bagian dari wilayah ibu kota baru. Dengan alokasi Dana Desa yang memadai, desa-desa tersebut dapat meningkatkan infrastruktur

lokal, mengembangkan potensi ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan ibu kota negara.

Dana Desa menjadi pendorong utama pembangunan infrastruktur dasar yang vital bagi kesiapan ibu kota negara baru. Melalui Dana Desa, pemerintah desa dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas dengan memperbaiki jalan desa, jembatan, saluran air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung efisiensi operasional pemerintahan pusat tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, menjadikannya tempat yang lebih menarik bagi penduduk baru.

Selain itu, Dana Desa merupakan instrumen vital dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM memperkuat ekonomi desa-desa yang kemudian menjadi pilar penting bagi ibu kota negara. Langkah-langkah seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha akan meningkatkan daya saing ekonomi desa, menjadikannya bagian integral dari ekonomi ibu kota yang lebih besar dan beragam. Dengan demikian, Dana Desa memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan desa-desa untuk berintegrasi dengan ibu kota negara baru, memperkuat infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menjaga keberlanjutan



lingkungan, yang semuanya menjadi landasan kuat bagi pembangunan ibu kota negara yang modern dan berkelanjutan.

(Sumber: DJPK)

Dana Desa (DD) menjadi instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Pulau Kalimantan. Dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran DD di berbagai kabupaten di Pulau Kalimantan menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kabupaten Ketapang, misalnya, mengalami peningkatan dari 217,29 miliar pada tahun 2018

Gambar 4. 6 DD Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022 menjadi
267,55

miliar pada tahun 2021, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Hal serupa terlihat di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kubu Raya yang juga mencatat peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun.

Peningkatan DD ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pada peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Kabupaten Lamandau, Gunung Mas, dan Pulang Pisau, misalnya, mengalokasikan DD dengan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui program-program yang terukur dan tepat sasaran. Dengan penggunaan DD yang efektif, pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik di daerah pedesaan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kesiapan Kabupaten Pulau Kalimantan dalam menjadi ibu kota negara baru yang responsif dan berdaya saing.

Perkembangan positif dalam penyaluran DD di Kabupaten Pulau Kalimantan juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di

daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Peningkatan DD pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola alokasi anggaran dengan baik untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui program-program yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

4.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif

	IPM	DAK	DAU	DBH	DD	DID
Mean	69.03718	473.9	558.3	661.1	120.3	28.1
Median	69.21000	366.5	516.4	314.2	108.7	26.8
Maximum	73.13000	2165.7	1152.2	5102.6	268.5	85.5
Minimum	64.90000	95.5	347.6	17.4	55.2	1.91
Observations	85	85	85	85	85	85

(Data Diolah:Evews10)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah data pada tiap variabel yaitu sebanyak 85. Jumlah tersebut berasal dari 17 sampel dari penelitian ini, yaitu kabupaten di seluruh pulau Kalimantan pada tahun 2018-2022.

IPM adalah indikator yang penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk suatu daerah. Berdasarkan data statistik deskriptif, rata-rata IPM di

kabupaten-kabupaten Pulau Kalimantan adalah sekitar 69.04, dengan nilai median sebesar 69.21. Nilai maksimum IPM mencapai 73.13, sementara nilai minimumnya adalah 64.90. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten memiliki IPM yang relatif tinggi, namun terdapat variasi signifikan dalam kualitas hidup penduduk antar kabupaten.

DAU adalah dana yang dialokasikan secara rutin untuk membiayai berbagai kegiatan operasional pemerintah daerah. Rata-rata DAU di kabupaten-kabupaten Pulau Kalimantan mencapai 558.3 milyar rupiah, dengan median sebesar 516.4 milyar rupiah. Nilai maksimum DAU adalah 1152.2 milyar rupiah, sementara nilai minimumnya adalah 347.6 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa DAU memberikan dukungan finansial yang signifikan untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan di setiap kabupaten.

DAK mencerminkan alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Rata-rata DAK yang diterima oleh kabupaten-kabupaten di Pulau Kalimantan mencapai 473.9 milyar rupiah, dengan nilai median sebesar 3665 milyar rupiah. Nilai maksimum DAK mencapai 2165.7 milyar rupiah, sedangkan nilai minimumnya adalah 95.5. Variasi ini menunjukkan bahwa beberapa kabupaten menerima dana yang jauh lebih besar untuk pengembangan infrastruktur dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

DBH adalah bagian dari pendapatan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah. Rata-rata DBH yang diterima oleh kabupaten-kabupaten di Pulau Kalimantan mencapai 661.1 milyar rupiah, dengan median sebesar 314.2 milyar rupiah. Nilai maksimum DBH mencapai 5102.6 milyar rupiah, sedangkan nilai minimumnya adalah 17.4 milyar rupiah. Variasi ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten dengan sumber daya alam

yang besar dapat menerima DBH yang signifikan, sementara kabupaten lain mungkin menerima jumlah yang lebih rendah.

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana tambahan yang diberikan pemerintah pusat sebagai insentif bagi daerah yang siap menjadi ibu kota negara. Rata-rata DID di kabupaten-kabupaten Pulau Kalimantan adalah sekitar 28.1 milyar rupiah, dengan median sebesar 26.8 milyar rupiah. Nilai maksimum DID mencapai 85.5 milyar rupiah, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung transformasi ibu kota negara. Namun, dengan nilai minimum DID sebesar 1.91 milyar rupiah, masih terdapat variasi dalam kesiapan dan dukungan terhadap daerah-daerah tersebut.

Dana Desa (DD) adalah alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa-desa untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Rata-rata DD di kabupaten-kabupaten Pulau Kalimantan adalah sekitar 120.3 milyar rupiah, dengan median sebesar 108.7 milyar rupiah. Nilai maksimum DD mencapai 268.5 milyar rupiah, menunjukkan bahwa beberapa desa menerima dukungan signifikan untuk pembangunan lokal mereka. Namun, nilai minimum DD sebesar 55.2 milyar rupiah menyoroti perbedaan yang signifikan dalam alokasi dana di antara desa-desa.

4.2.1 Pendekatan Model

Adapun model persamaan dalam penelitian ini :

Tabel 4. 2 Pendekatan Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.819371	0.184711	4.435953	0.0000
LOG_DAU	0.063127	0.013592	4.644519	0.0000
LOG_DAK	0.007819	0.002801	2.791989	0.0069
LOG_DBH	0.007487	0.002485	3.012826	0.0037

LOG_DID	-0.000529	0.000559	-0.947886	0.3468
LOG_DD	0.009759	0.005520	1.767983	0.0819

Data Diolah: Eviews 10

Hasil estimasi dengan metode Fixed effect dapat dilihat pada tabel diatas. Berdasarkan pada hasil estimasi diatas jika dibentuk persamaan model didapat sebagai berikut :

$$\text{LOG_IPMit} = 0.819371 + 0.063127 \text{ LOG_DAUit} + 0.007819 \text{ LOG_DAKit} + 0.007487 \text{ LOG_DBHit} - 0.000529 \text{ LOG_DIDit} + 0.009759 \text{ LOG_DDit} + \epsilon \text{it}$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

DAU : Dana alokasi umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

DID : Dana Insentif Daerah

DD : Dana Desa

ϵ : Error

i : Banyaknya observasi

t : Waktu

LOG : Logaritma

Dari persamaan di atas, dapat diketahui interpretasi dari persamaan di atas sebagai berikut:

- Nilai Konstanta = 0.819371 yang berarti jika Dana Alokasi Umum (LOG_DAU), Dana Alokasi Khusus (LOG_DAK), Dana Bagi Hasil (LOG_DBH), Dana Insentif Daerah (LOG_DID), dan Dana Desa

(LOG_DD) bernilai 0 (nol) maka menunjukkan kenaikan ipm di kabupaten pulau Kalimantan sebesar 0.819371 persen.

- b. $LOG_DAU = +0.063127$ memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia, jika dana alokasi umum meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan skor indeks pembangunan manusia sebesar 0.063127 persen.
- c. $LOG_DAK = +0.007819$ memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia, jika dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.007819 persen.
- d. $LOG_DBH = +0.007487$ memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia, jika dana bagi hasil meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan indeks Pembangunan manusia sebesar 0.007487 persen.
- e. $LOG_DID = - 0.000529$ memiliki hubungan negatif terhadap indeks pembangunan manusia, jika dana bagi hasil meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.000529 persen.
- f. $LOG_DD = +0.009759$ memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia, jika dana desa meningkat sebesar 1 persen maka akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.009759 persen.

4.2.2 Pemilihan Model

4.2.2.1 Uji Chow

Tabel 4. 3 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	324.963687	(16,63)	0.0000
Cross-section Chi-square	376.142965	16	0.0000

Data Diolah: Eviews10

Berdasarkan tabel diatas diketahu probability cross section chi-square sebesar 0.0000. hal tersebut berarti kurang dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$) maka secara statistic H1 diterima dan tolak H0. Sehingga dalam uji chow ini model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.2.2.2 Uji Hausman

Tabel 4. 4 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.151186	5	0.0000

Sumber: Eviews10

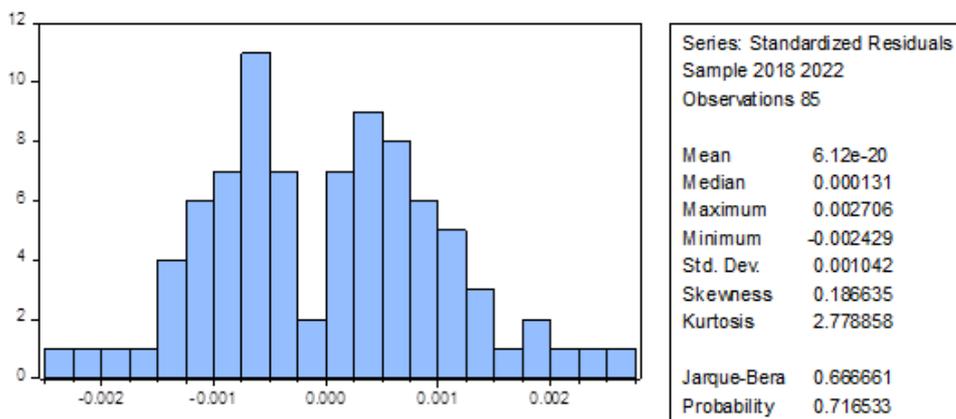
Berdasarkan tabel diatas diketatui probability cross section random sebesar 0.0000. hal tersebut berarti kurang dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$) maka secara statistic H1 diterima dan tolak H0. Sehingga dalam uji chow ini model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.2.3 Teknik Analisis Data

4.2.3.1 Uji Asumsi Klasik

Dalam permodelan analisis regresi, uji asumsi klasik digunakan untuk memeriksa asumsi yang ada. Tujuan dari uji asumsi klasik yakni guna memperoleh model regresi yang benar-benar baik yang sanggup menyediakan estimasi yang dapat diandalkan dan tidak tepat dengan kaidah Best Linear Unbiased Estimatori (BLUE). Estimator BLUE harus memenuhi kriteria tersebut pada uji asumsi klasik, tetapi kemudian muncul beberapa masalah yang dapat menyebabkan estimasi tidak memenuhi asumsi kriteria BLUE, yaitu:

4.2.3.1.1 Uji Normalitas



Data Diolah: Eviews10

Berdasarkan gambar diatas diketatui nilai probability sebesar 0.716533. Hal tersebut berarti lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0.05 ($0.716533 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.2.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas

	LOG_DAU	LOG_DAK	LOG_DBH	LOG_DID	LOG_DD
LOG_DAU	1.000000	0.231293	-0.418792	-0.119267	0.543981
LOG_DAK	0.231293	1.000000	0.389534	-0.277561	0.314271
LOG_DBH	-0.418792	0.389534	1.000000	0.017365	0.272848
LOG_DID	-0.119267	-0.277561	0.017365	1.000000	0.081321
LOG_DD	0.543981	0.314271	0.272848	0.081321	1.000000

Data Diolah: Eviews10

Berdasarkan tabel dapat diketahui jika nilai semua data kurang dari 0.80 (<0.80) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.072147	0.085195	-0.846852	0.4003
LOG_DAU	0.007144	0.006269	1.139538	0.2588
LOG_DAK	-0.001021	0.001292	-0.790498	0.4322
LOG_DBH	0.001489	0.001146	1.299452	0.1985
LOG_DID	-3.83E-05	0.000258	-0.148533	0.8824
LOG_DD	-0.001424	0.002546	-0.559348	0.5779

Data Diolah: Eviews10

Dari table diatas semua variabel memiliki nilai probability diatas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.3.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi

DU	DW	4DU
1,7736	2,0466	2,2264

Data Diolah: Eviews10

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai DW 2.046596 dan nilai DU 1.7736, maka dapat diperoleh $DU (1.7736) < DW (2.046596) < 4-DU (2.2264)$ dapat disimpulkan H1 diterima maka data tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tabel 4. 8 Uji Statistik t

Variable	t-Statistic	T tabel	Prob.	Hasil
LOG_DAU	4.644519	1,99045021	0.0000***	Berpengaruh, Signifikan
LOG_DAK	2.791989	1,99045021	0.0069**	Berpengaruh, Signifikan
LOG_DBH	3.012826	1,99045021	0.0037**	Berpengaruh, Signifikan
LOG_DID	-0.947886	- 1,99045021	0.3468	Berpengaruh dan tidak signifikan
LOG_DD	1.767983	1,99045021	0.0819*	Tidak berpengaruh dan signifikan

Data Diolah: Eviews10

*** = *Tingkat signifikansi 1%*

** = *Tingkat signifikansi 5%*

* = *Tingkat signifikansi 10%*

1. Dana alokasi umum : nilai t-hitung (4.644519) > t tabel (1,99045021) sehingga keputusannya terima H1 artinya terdapat pengaruh dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di pulau kalimantan tahun 2018-2022.
2. Dana alokasi khusus: nilai t-hitung (4.644519) > t tabel (1,99045021) sehingga keputusannya terima H2 artinya terdapat pengaruh dan signifikan antara dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di pulau kalimantan tahun 2018-2022.
3. Dana bagi hasil : nilai t-hitung (3.012826) > t tabel (1,99045021) sehingga keputusannya terima H3 artinya terdapat pengaruh dan signifikan antara dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di pulau kalimantan tahun 2018-2022.
4. Dana insentif daerah : nilai t-hitung (-0.947886) > t tabel (-1,99045021) sehingga keputusannya terima H4 artinya terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara dana insentif daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di pulau kalimantan tahun 2018-2022.
5. Dana desa : nilai t-hitung (1.767983) < t tabel (1,99045021) sehingga keputusannya terima H5 artinya tidak terdapat pengaruh dan signifikan antara dana desa terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten di pulau kalimantan tahun 2018-2022.

4.3.2 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 4. 9 Uji Statistik F

	F tabel	Probability	Hasil
F- statistic	2.25346872	0.000000	Berpengaruh secara simultan

Data Diolah: Eviews10

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai probability F statistic (0.000000) < 0.05 maka terima H1, variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah dan dana desa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia secara simultan.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Tabel 4. 10 Koefisien Determinasi

R-squared	0.994392
Adjusted R-squared	0.992523

Data Diolah: Eviews10

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R-squared sebesar 0.992523 atau sama dengan 99.25% yang memiliki arti bahwa variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah dan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia sebesar 99.25% dan sisanya 0.75% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan metode *Fixed Effect*, ditemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan koefisien sebesar +0.063127. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan alokasi DAU sebesar 1 persen akan menurunkan skor IPM sebesar 0.063127 poin. Meskipun secara angka terlihat adanya penurunan, hasil ini perlu dipahami dengan lebih lanjut, mengingat penurunan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakefisienan distribusi atau alokasi dana yang belum optimal di tingkat daerah.

Dalam konteks teori pembangunan manusia dari Amartya Sen (1999), DAU memiliki peran penting dalam memperluas kapabilitas dan kebebasan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik di sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketika DAU dialokasikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan mendanai program-program sosial, dampak positifnya akan terlihat dalam peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan publik yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang memperhatikan pembangunan manusia melalui DAU sejalan dengan teori Sen yang menekankan pentingnya kapabilitas individu dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Salah satu cara DAU berkontribusi pada pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Alokasi DAU untuk sektor pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik,

memperbaiki infrastruktur sekolah, dan menyediakan sumber daya pembelajaran yang memadai. Hal ini sejalan dengan pandangan Sen, yang menekankan pentingnya pendidikan dalam memperluas kapabilitas individu. Pendidikan berkualitas memberikan kebebasan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dengan demikian, pengalokasian DAU yang tepat untuk pendidikan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada pembangunan jangka panjang.

Selain pendidikan, DAU juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat daerah. Dengan alokasi dana yang cukup, pemerintah daerah dapat memperbaiki fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan layanan kesehatan yang terjangkau. Menurut Sen, kesehatan adalah salah satu aspek fundamental dari kapabilitas manusia. Tanpa akses ke layanan kesehatan yang memadai, individu akan mengalami keterbatasan dalam mencapai potensi mereka secara penuh. Oleh karena itu, kebijakan yang memprioritaskan alokasi DAU untuk sektor kesehatan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal angka harapan hidup dan produktivitas.

DAU juga berperan dalam mendanai program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan rentan. Program-program ini dapat berupa bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta inisiatif peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan Sen, upaya untuk mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang yang memungkinkan

individu untuk hidup bermartabat. Melalui DAU, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mendesain program-program yang berfokus pada pemberdayaan individu, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kebebasan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Selain itu, teori Desentralisasi Fiskal dari Martinez-Vazquez & McNab menyatakan bahwa transfer fiskal dari pusat ke daerah memberi pemerintah daerah kewenangan lebih besar dalam menentukan penggunaan dana sesuai kebutuhan spesifik lokal. Dalam hal ini, DAU sebagai instrumen desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk merespons tantangan pembangunan lokal, seperti peningkatan akses kesehatan di daerah terpencil atau program peningkatan kapasitas di sektor pendidikan yang masih tertinggal. Sebagai hasilnya, penggunaan DAU yang tepat akan mendukung pembangunan manusia secara lebih efektif karena pemerintah daerah lebih memahami prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pentingnya DAU dalam konteks pembangunan manusia dapat dilihat dari fleksibilitasnya yang memungkinkan daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Sebagai contoh, daerah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas, terutama di daerah terpencil, dapat menggunakan DAU untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, menambah tenaga medis, atau menyediakan program layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan dana ini dapat lebih efektif merancang kebijakan yang menjawab permasalahan spesifik, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain sektor kesehatan, DAU juga memungkinkan daerah untuk memperkuat sektor pendidikan. Di banyak daerah tertinggal, kapasitas infrastruktur pendidikan,

ketersediaan guru yang berkualitas, serta akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai masih menjadi tantangan utama. Melalui penggunaan DAU, pemerintah daerah dapat mendanai program-program untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, serta memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, DAU tidak hanya mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di seluruh wilayah Indonesia lebih merata, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan IPM.

Efektivitas DAU dalam meningkatkan IPM sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan merancang kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah yang memiliki perencanaan yang matang dan transparan cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan DAU untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang baik agar penggunaan DAU benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah pusat juga tetap penting, terutama dalam hal memberikan panduan dan pengawasan untuk memastikan bahwa transfer fiskal digunakan secara efektif.

DAU sebagai bagian dari desentralisasi fiskal memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan manusia di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan spesifik lokal, DAU dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, agar potensi ini dapat dimaksimalkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan,

sehingga transfer fiskal seperti DAU benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian target IPM yang lebih tinggi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu DAU pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dengan kata lain IPM akan mengalami peningkatan (Pradnyantari dan Dwirandra, 2017). Pengujian membuktikan kalau DAU meningkatkan IPM secara signifikan (Rohmahwati, 2021). Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, atau PAD, dan Dana Alokasi Khusus, atau DAK, adalah yang paling berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, menurut diskusi tentang dana transfer (DAU, DBH, DAK, dan pendapatan lain yang sah). Nilai keserbagunaan individu atau dampak absolut dapat menunjukkan dampak ini. (Suhyanto et al., 2020).

Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal melalui DAU harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik di masing-masing daerah agar dapat memberikan dampak yang optimal pada IPM. Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan DAU serta pengawasan yang lebih baik dapat memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan untuk program prioritas, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan cara ini, DAU dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat pencapaian pembangunan manusia di seluruh daerah.

4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pada estimasi diatas menggunakan metode Fixed Effect diketahui bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien dana alokasi umum

+0.007819 memiliki arti jika kenaikan dana alokasi khusus sebesar 1 persen maka akan menaikkan skor indeks Pembangunan manusia sebesar 0.007819.

Teori pembangunan infrastruktur (Romer, 1990) menyatakan bahwa investasi dalam infrastruktur fisik, seperti jalan, listrik, sanitasi, dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta memperbaiki penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam pengukuran IPM. Dalam konteks DAK, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur mendukung tercapainya layanan dasar yang lebih baik di daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan berdampak pada peningkatan IPM.

Investasi dalam infrastruktur fisik juga memiliki dampak langsung pada kualitas penyediaan layanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan melalui pembangunan jalan dan transportasi, serta penyediaan listrik dan internet di daerah terpencil, aksesibilitas terhadap pendidikan meningkat secara signifikan. Infrastruktur yang memadai juga mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui akses yang lebih cepat ke fasilitas medis, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Teori Romer mengindikasikan bahwa kemajuan dalam infrastruktur fisik dapat mempercepat pertumbuhan kapabilitas manusia, yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dana Alokasi Khusus (DAK), alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur fisik memainkan peran penting dalam mendukung tercapainya layanan dasar yang lebih

baik di daerah-daerah yang membutuhkan. DAK yang ditujukan untuk infrastruktur memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun dan memperbaiki jalan, memperluas jaringan listrik, serta meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ini sangat penting terutama bagi daerah-daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Dengan pembangunan infrastruktur ini, berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik dapat diatasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pengembangan infrastruktur yang dibiayai oleh DAK juga dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui peningkatan daya tarik investasi dan perdagangan. Aksesibilitas yang lebih baik karena pembangunan jalan, pelabuhan, atau bandara, misalnya, dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta menarik investasi baru yang akan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, infrastruktur komunikasi seperti jaringan internet juga memungkinkan peningkatan akses informasi dan teknologi, yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Ini sejalan dengan teori Romer yang menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Selain itu, teori desentralisasi fiskal yang didukung oleh Oates (2006) juga relevan dalam menjelaskan pengaruh DAK terhadap IPM. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk alokasi dana untuk pelayanan publik yang disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat. Pemberian kewenangan fiskal kepada daerah melalui DAK meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan DAK yang digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, desentralisasi

fiskal mampu mendorong pembangunan manusia secara lebih efektif, yang tercermin dalam peningkatan IPM.

DAK memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, atau membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pendidikan, misalnya, DAK dapat digunakan untuk membangun sekolah di daerah terpencil, memperbaiki fasilitas yang sudah ada, atau memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Dengan demikian, DAK tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan, tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain sektor pendidikan, DAK juga memiliki kontribusi besar dalam sektor kesehatan. Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat memanfaatkan DAK untuk membangun puskesmas, rumah sakit, atau menyediakan peralatan medis yang dibutuhkan. Selain itu, DAK dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan atau pengiriman tenaga medis ke daerah-daerah terpencil. Dengan adanya peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, masyarakat di daerah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga akan berkontribusi pada peningkatan indikator kesehatan yang menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM.

Sektor infrastruktur juga menjadi salah satu fokus penggunaan DAK, terutama dalam upaya memperbaiki konektivitas antar daerah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Pembangunan infrastruktur yang didanai oleh

DAK, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah mengakses sekolah dan fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan IPM.

Desentralisasi fiskal melalui DAK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan manusia di tingkat lokal. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana sesuai dengan kebutuhan lokal, DAK mampu meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Ketika DAK digunakan secara efektif untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hal ini akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan dalam sektor-sektor ini akan tercermin dalam peningkatan IPM, yang merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

Secara teori hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu DAK yang dialokasikan untuk pelayanan publik yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara teori berarti memiliki dampak dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu daerah (Sulastri dan Efendri, 2021). Kesimpulan berikutnya menunjukkan bahwa DAU, DAK Fisik dan Nonfisik, baik secara bersamaan maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap IPM (Suhyanto et al., 2020). Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap IPM adalah penelitian Saswatata dan Parju (2022).

4.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pada estimasi diatas menggunakan metode Fixed Effect diketahui bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien dana alokasi umum $+0.007487$ memiliki arti jika kenaikan dana bagi hasil sebesar 1 persen maka akan menaikkan skor indeks Pembangunan manusia sebesar 0.007487 . Temuan ini mendukung gagasan bahwa DBH, sebagai bagian dari transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah melalui pembiayaan sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Menurut Teori Kebijakan Fiskal yang dikemukakan oleh Keynes (2018), kebijakan fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mengelola ekonomi makro melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pengeluaran pemerintah, dalam hal ini DBH, memungkinkan daerah untuk memiliki dana yang cukup dalam mendanai proyek-proyek yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, DBH yang digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berperan langsung dalam peningkatan IPM karena layanan dasar tersebut merupakan indikator penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Penggunaan DBH memungkinkan pemerintah daerah memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mendanai berbagai proyek yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ini sering kali digunakan untuk proyek-proyek yang bersifat pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Keynes, dengan meningkatnya belanja pemerintah dalam sektor-sektor penting ini, daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus

memperbaiki layanan dasar yang penting bagi masyarakat. Kualitas layanan ini, pada akhirnya, berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), DBH memiliki peran strategis. IPM mengukur kualitas hidup masyarakat dengan memperhitungkan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Pengeluaran pemerintah daerah yang difokuskan pada sektor pendidikan, seperti pembangunan fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan program beasiswa, dapat meningkatkan tingkat literasi dan lama sekolah, yang merupakan indikator penting dalam IPM. Selain itu, investasi dalam sektor kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan program layanan kesehatan, turut memperbaiki harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat, yang juga menjadi komponen utama dalam pengukuran IPM.

Selain pendidikan dan kesehatan, investasi infrastruktur yang didanai oleh DBH juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan IPM. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sistem air bersih, memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan infrastruktur yang memadai, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian daerah dan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Teori Pembangunan Ekonomi Regional yang diuraikan oleh Arsyad (2014) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. DBH, sebagai instrumen yang mendukung desentralisasi fiskal, memberi daerah otonomi lebih besar dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk

meningkatkan layanan publik dan infrastruktur yang dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan daerah yang kurang berkembang. Dengan demikian, DBH tidak hanya membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah untuk menyediakan layanan yang memadai bagi masyarakat.

Secara teori hasil penelitian ini sesuai dengan teori kebijakan fiskal. Penggunaan dana bagi hasil dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dengan meningkatkan alokasi dana untuk sektor-sektor kunci pembangunan manusia. DBH dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi dana pada sektor-sektor kunci pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Penyediaan dana yang cukup dan tepat waktu untuk sektor-sektor ini dapat berkontribusi langsung pada peningkatan IPM.

Pendapat dari berbagai penelitian sebelumnya mendukung fakta bahwa DBH berperan signifikan dalam meningkatkan IPM. Sulastri & Efendri (2021) menemukan bahwa alokasi DBH, jika digunakan secara optimal, dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, yang secara langsung berkontribusi pada perbaikan IPM. Selain itu, Suhyanto et al. (2020) menambahkan bahwa peningkatan alokasi DBH tidak hanya memberikan efek positif secara parsial, tetapi juga bersama-sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mempercepat peningkatan IPM di berbagai wilayah.

Dengan demikian, DBH berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Efisiensi dan keadilan dalam alokasi DBH sangat krusial untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang memerlukan dukungan

lebih besar dapat mengakses dana yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan IPM.

4.4.4 Pengaruh Dana Insentif Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pada estimasi diatas menggunakan metode Fixed Effect diketahui bahwa variabel dana insentif daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien dana alokasi insentif – 0.000529 memiliki arti jika kenaikan dana bagi hasil sebesar 1 persen maka akan menurunkan skor indeks pembangunan manusia sebesar 0.000529 yang bertentangan dengan harapan bahwa DID akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada premis bahwa insentif keuangan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menyediakan layanan publik. Sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, DID dirancang untuk memberi penghargaan kepada daerah-daerah yang berhasil mencapai kinerja tertentu, seperti peningkatan dalam pengelolaan keuangan, kualitas layanan publik, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, secara teori, DID diharapkan mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan dasar, yang pada gilirannya tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Dana Insentif Daerah terhadap IPM cenderung negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan utama alokasi DID dengan hasil yang diharapkan dalam pembangunan manusia. IPM yang mencakup indikator-indikator penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, seharusnya dapat ditingkatkan

melalui pemanfaatan DID. Namun, kenyataannya, data empiris menunjukkan bahwa dampak dari DID terhadap IPM tidak selalu sesuai dengan harapan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme insentif fiskal dalam mendorong pembangunan daerah secara holistik.

Dalam konteks teori desentralisasi fiskal, otonomi daerah yang diberikan melalui pelimpahan kewenangan keuangan dan administratif bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Teori ini berargumen bahwa pemerintah daerah, dengan pengetahuan lokal yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat, seharusnya dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik, yang diharapkan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan IPM. Namun, dalam kenyataannya, berbagai faktor teknis dan administratif menghambat tercapainya tujuan tersebut.

Salah satu alasan utama mengapa DID tidak memberikan dampak signifikan terhadap IPM adalah masalah dalam implementasi kebijakan publik. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, kebijakan yang baik di tingkat pusat tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan di lapangan karena berbagai tantangan dalam proses implementasi. Tantangan ini dapat mencakup keterbatasan teknis, kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, serta koordinasi yang buruk antara berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan DID, jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk merencanakan, mengelola, dan memantau penggunaan dana tersebut, maka dampaknya terhadap pembangunan manusia akan menjadi minimal.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas DID adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Kurangnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan DID dapat menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya menghambat upaya pembangunan. Akuntabilitas yang rendah juga membuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan menjadi lemah, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki insentif yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan DID untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga di tingkat lokal, yang membuat program-program pembangunan tidak berjalan secara optimal.

DID dapat lebih efektif dalam mendorong peningkatan IPM, diperlukan perbaikan dalam aspek implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran dan program pembangunan, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan insentif yang diberikan melalui DID dapat secara nyata meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan IPM.

Teori desentralisasi fiskal, yang menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, juga tidak selalu relevan dalam menjelaskan hasil ini. Desentralisasi fiskal hanya akan efektif jika daerah memiliki kapasitas fiskal dan administratif yang kuat. Di banyak daerah, otonomi keuangan sering tidak didukung oleh peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan anggaran, sehingga dana yang diberikan tidak dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas

hidup masyarakat. Alokasi DID bisa jadi digunakan untuk proyek yang tidak terkait langsung dengan peningkatan IPM, seperti infrastruktur atau belanja operasional yang tidak menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.

Teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen juga memberikan perspektif bahwa pembangunan seharusnya berfokus pada peningkatan kapabilitas individu, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks ini, DID seharusnya bisa mendorong perbaikan di sektor-sektor tersebut. Namun, jika alokasi dana ini tidak diarahkan secara spesifik pada program-program yang mendukung pengembangan kapabilitas masyarakat, maka dampaknya terhadap IPM akan terbatas. Sehingga, meskipun teori pembangunan manusia menggarisbawahi pentingnya perbaikan kapabilitas individu untuk pembangunan, kelemahan dalam implementasi kebijakan DID di tingkat daerah membuat teori ini kurang relevan dalam menjelaskan hasil yang tidak signifikan terhadap IPM.

Secara keseluruhan, teori desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia menunjukkan potensi manfaat dari kebijakan seperti DID, tetapi implementasi yang kurang efektif serta rendahnya kapasitas di tingkat daerah menjadi faktor utama yang menjelaskan mengapa DID tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kesimpulannya, ketidakefektifan pengelolaan, kekurangan kapasitas teknis di tingkat daerah, serta kurangnya keterkaitan antara alokasi DID dengan kebutuhan pembangunan manusia yang mendesak dapat menjadi alasan mengapa DID tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan proyek-proyek yang dibiayai oleh DID sangat penting untuk mencapai dampak yang diharapkan.

4.4.5 Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil pada estimasi diatas menggunakan metode Fixed Effect diketahui bahwa variabel dana desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien dana alokasi umum $+0.009759$ memiliki arti jika kenaikan dana desa sebesar 1 persen maka akan menaikkan skor indeks Pembangunan manusia sebesar 0.009759 .

Dana Desa yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan, alokasi, atau implementasi penggunaan dana tersebut. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, salah satu tujuan utama dari pengalokasian DD adalah untuk memberikan otonomi kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki guna memenuhi kebutuhan lokal, termasuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merupakan indikator utama IPM. Namun, fakta bahwa DD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwa hanya pemberian otonomi fiskal saja tidak cukup tanpa adanya kapasitas pengelolaan yang memadai.

Keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek yang didanai DD sering kali menjadi kendala utama. Menurut teori pertanggungjawaban, keberhasilan penggunaan DD sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek. Namun, jika partisipasi ini rendah atau tidak optimal, proyek yang dijalankan mungkin tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dampak positifnya terhadap IPM menjadi terbatas. Misalnya, alokasi DD untuk infrastruktur yang tidak mendukung langsung pada peningkatan layanan pendidikan atau kesehatan dapat mengurangi efek positif DD terhadap IPM.

Teori desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan juga kurang relevan dalam menjelaskan mengapa DD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan oleh Bahl dan Linn (2014), mengandaikan bahwa dengan otonomi keuangan, pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, kurangnya pengawasan yang ketat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan masalah birokrasi di tingkat desa sering kali menyebabkan alokasi DD tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan layanan dasar yang berdampak langsung pada IPM.

Sementara itu, teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan, seharusnya juga relevan. Namun, karena dalam praktiknya penggunaan DD mungkin lebih banyak difokuskan pada proyek-proyek infrastruktur yang tidak secara langsung memengaruhi aspek sosial atau kualitas hidup dalam jangka pendek, dampaknya terhadap IPM menjadi tidak signifikan. Pembangunan yang hanya fokus pada infrastruktur tanpa perencanaan strategis yang melibatkan aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi tidak mampu mendongkrak indikator IPM seperti pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan.

Teori pertanggung jawaban lebih relevan dalam menjelaskan mengapa Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Teori pertanggungjawaban menekankan bahwa pengelola dana, dalam hal ini pemerintah desa, harus bertindak demi kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas program yang didanai. Namun, di banyak desa, partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga keputusan penggunaan Dana Desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat .

Kurangnya partisipasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, rendahnya pemahaman tentang pentingnya pengawasan, dan kurangnya transparansi dari pemerintah desa. Akibatnya, proyek yang didanai tidak memberikan dampak signifikan pada IPM. Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban menekankan bahwa tanpa partisipasi yang optimal, pengelolaan Dana Desa tidak akan memberikan hasil yang diharapkan, termasuk peningkatan IPM.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Penelitian (m. Afrizal yusuf, 2019) bahwa Dana Desa berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia di setiap kabupaten di Jawa Barat. Menruut (Dydha, 2017) hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Desa, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap komponen-komponen IPM. A'fifah, (2021) mengatakan Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan Dana Desa, PAD, dan Dana Perimbangan, serta analisis data panel untuk menguji pengaruh Dana Desa, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap komponen IPM, yakni AHH, RLS, dan PPP di Indonesia. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Desa, DBH, DAU, dan DAK secara positif dan signifikan memengaruhi komponen-komponen IPM.